

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap pemberian Opini Audit BPK. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kementerian dan Lembaga (K/L) yang telah diaudit oleh BPK dan tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 85 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memenuhi kriteria dengan periode pengamatan pada tahun 2016 – 2018. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK.

B. Implikasi

1. Teoritis

Penelitian ini mendapatkan hasil yang membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian Opini Audit BPK, sedangkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK. Hasil penelitian ini menambah bukti secara empiris yang memperkuat teori keageanan bahwa Opini Audit BPK merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L), atas pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan negara kepada masyarakat. Dengan mendapatkan opini yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka akan semakin tinggi keyakinan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L..

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat teori atribusi yang menjelaskan mengenai faktor penyebab terbentuknya opini audit yang didapatkan oleh K/L berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana dalam penelitian ini dibuktikan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai faktor internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai faktor eksternal yang keduanya memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK.

Meskipun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SPI sebagai faktor internal tidak dapat memperkuat teori atribusi dikarenakan hasil yang

menunjukkan bahwa SPI tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pertimbangan pemberian opini audit BPK, namun pengimplementasian SPI dalam instansi sangat penting dalam menciptakan tata kelola instansi guna mewujudkan penerapan *Good Governance* yang baik. Penerapan SPI yang baik mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan terhambatnya efektivitas dan efisiensi kinerja instansi. Dengan pengimplementasian SPI yang baik, dapat menciptakan tata kelola instansi yang efektif dan efisien, yang mampu mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam internal instansi, dan mampu menjadi meningkatkan keyakinan pemeriksa atas keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan yang dapat menjadi faktor penunjang bagi BPK sebagai pertimbangan dalam memberikan opini audit.

2. Praktis

a. Bagi Auditor Internal Instansi Pemerintah

Menjadi referensi bahwa secara studi ilmiah telah dibuktikan bahwa faktor untuk mendapatkan Opini Audit yang baik didasarkan dari dua faktor yaitu faktor internal berupa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan faktor eksternal berupa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Audit yang keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian Opini Audit BPK. Auditor Internal Instansi Pemerintah dapat meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tercipta pengelolaan sumber

daya keuangan instansi yang baik dan bertanggungjawab serta melaksanakan Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang diberikan oleh BPK terutama untuk temuan yang bersifat material.

Selain itu, menjadi referensi dalam memahami pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap pemberian Opini Audit BPK. Meskipun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pertimbangan pemberian Opini Audit BPK, namun pengimplementasian SPI dalam instansi sangat penting dalam menciptakan tata kelola instansi yang baik. Auditor Internal Instansi Pemerintah harus tetap meningkatkan kualitas pengimplementasian SPI dalam internal instansi secara optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan terhambatnya efektivitas dan efisiensi kinerja instansi. Dengan terciptanya tata kelola instansi yang efektif dan efisien, mampu mencegah potensi terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam internal instansi, sehingga mampu meningkatkan keyakinan pemeriksa BPK atas tingkat keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Tingkat kredibilitas atas keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang baik dapat menjadi faktor pendukung bagi BPK sebagai pertimbangan dalam memberikan opini audit yang lebih baik kepada instansi;

b. Bagi Auditor BPK

Memberikan bukti empiris dari sudut pandang studi ilmiah mengenai pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap pemberian Opini Audit BPK. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan metode pemeriksaan serta pengambilan keputusan yang terkait dengan topik penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang secara keseluruhan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Kementerian dan Lembaga;
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Pseudo R-Square* yang kecil yakni sebesar 0.112 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 11.2% yang berarti 88.8% variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini;
3. Pada variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini menggunakan indikator yang terbatas hanya pada jumlah keseluruhan temuan kasus dan tidak

menggunakan indikator temuan kasus yang lebih spesifik seperti yang digunakan oleh BPK;

4. Penelitian ini terbatas dengan mengasumsikan semua objek dalam penelitian memiliki tingkat kompleksitas yang sama dan tidak mempertimbangkan mengenai perbedaan tingkat kompleksitas pada masing-masing objek yang diteliti.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran atau rekomendasi guna menyempurnakan penelitian selanjutnya, berikut ini rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada Kementerian dan Lembaga. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang lain seperti Pemerintah Daerah;
2. Penelitian ini menggunakan jumlah keseluruhan temuan kasus pada masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator temuan kasus yang lebih spesifik pada variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan seperti yang digunakan oleh BPK;

3. Mengingat penelitian ini menunjukkan nilai *Pseudo R-Square* yang hanya sebesar 0.112 dan terdapat variabel yang tidak berpengaruh. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan variabel lain yang masih terkait seperti opini audit tahun sebelumnya yang juga menjadi salah satu faktor pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit;
4. Penelitian ini tidak mempertimbangkan mengenai tingkat kompleksitas pada masing-masing objek yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan perbedaan tingkat kompleksitas pada masing-masing objek yang akan diteliti.